

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, 2007.
- Hartono, Siti Soemantri. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1981.
- Hoff, Jerry. *Undang-undang Kepailitan di Indonesia (penerjemah kartini Muljadi)*. Jakarta: Tata Nusa, 2000.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, Malang, 2006.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kansil, C. S. T. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Marsyahrul, Tony. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Nurdin, Andriani. *Kepailitan BUMN Persero berdasarkan Asas Kepastian Hukum*. Bandung: Alumni Bandung, 2012.
- Retnowulan, Sutantio. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*. Jakarta: Seri Varia Yustisia, 1996.

- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta; Kencana, 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan Memahami UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sumyar. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004.
- Suwantoro, Heri. *Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2019.
- Yulianto. *Pembatasan Hak Bank Selaku Kreditur Separatis Dalam Proses Kepailitan*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.

Skripsi/Tesis

- Afifah. “Penyelesaian Hak Normatif Pekerja Dalam Peraturan di Indonesia.” Skripsi Sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2018.
- Lontoh, Rielly. “Kedudukan Buruh Dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kepailitan.” Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2010.

Jurnal

- Aprianto, Samuel, Hayatul Ismi, dan Riska Fitriani. “Kedudukan Kreditor Preferen Dalam Kepailitan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol. 6 No. 2, (2019).
- Candrakirana, Ratih. “Hak Mendahulu Negara Atas Pembayaran Utang Pajak Dalam Putusan Pengadilan Niaga.” *Jurnal Mahasiswa Universitas Brawijaya*. (2017).

- Dewi, Kadek Sutrisna dan I Ketut Markeling. “Kedudukan Utang Upah Pekerja Dalam Kepailitan.” *Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya*. Vol. 01 No. 10. (Oktober 2013).
- Febianti, Agnes Ruth. et al. “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Istimewa Kantor Pelayanan Pajak Dalam Kedudukannya Sebagai Kreditor Preferen Pada Saat Pembayaran Boedel Pailit Berdasarkan Studi Kasus Kepailitan PT Metro Batavia.” *Diponegoro Law Review*. Volume 5 Nomor 2. 2016.
- Hasibuan, Sheila Miranda. et al. “Kedudukan Hak Mendahulu Tagihan Pajak Pada Proses Kepailitan (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga).” *USU Law Journal*. Vol. 7 No. 1. (Maret 2019).
- Nola, Luthvi Febryka. “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan.” *Negara Hukum*. Vol. 10 No. 2. 2019. Hlm. 156.
- Sulistyo, Raden Roro Nymphyra Jasmine dan Sri Harini Dwiyatmi. “Upah Pekerja Dalam Perusahaan Pailit (Kajian Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-VI/2008;018/PUU-VI/2008 dan 67/PUU-XI/2013).” *Jurnal Ilmu Hukum Aletha*. Vol. 2 No.2 (Februari 2019).
- Thobie, Marcel. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja PT Universal Footwear Utama Indonesia Akibat Kepailitan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst).” *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 2 No. 1. 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD Tahun 1945.
- Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004. LN No. 131 Tahun 2004. TLN. No. 4443.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*. TLN. No. 3632.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia*. LN No. 168 Tahun 1999.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja*. TLN. No. 6573.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. LN. No. 85 Tahun 2007.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. LN. No. 129 Tahun 2000.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. LN. No. 133 Tahun 2008.

Putusan Lembaga Peradilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 017 K/ N/2005.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 070 PK/ PDT.SUS/2009.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Agung No. 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Internet

Ariwibowo, Irwan. “Kreditur Preferen Dalam Pajak, Apakah Sama Dalam Versi Kepailitan?”. <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-pajak-kreditur-preferen-dalam-pajak-apakah-sama-dalam-versi-kepailitan-2019-11-05-57ba62b2/>.

- Nelson, Dicki. “Kedudukan Upah Buruh Dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/09/Kedudukan-Upah-Buruh-Dalam-Kepailitan-Pasca-Putusan-Mahkamah-Konstitusi.pdf>.
- Dwinanto, Rizki. “Urutan Prioritas Pelunasan Utang Dalam Kepailitan.” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dca8aad69118/urutan-prioritas-pelunasan-utang-dalam-kepailitan/>.
- Siregar, Leo. “Tanggung Jawab Perusahaan Pailit Terhadap Pekerja.” <https://leosiregar.com/tanggung-jawab-perusahaan-pailit-terhadap-pekerja/>.
- Pangaribuan, Juanda. “MK Pastikan Hak Pekerja dalam Kepailitan.” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d87b9cbe1da/mk-pastikan-hak-pekerja-dalam-kepailitan-broleh--juanda-pangaribuan-?page=3/>.
- Saputri, Maya. “921 Karyawan PT Nyonya Meneer Belum Terima Gaji Sejak 2015,” <https://tirto.id/921-karyawan-pt-nyonya-meneer-belum-terima-gaji-sejak-2015-cu5c>.
- Sulaiman, Alfin. “Akibat Hukum Jika Debitor Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Proses Kepailitan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57a04af17c45a/akibat-hukum-jika-debitor-melakukan-perbuatan-hukum-dalam-proses-kepailitan/>.
- Berita, Hukum Online. “Hukum Kepailitan Dinilai Reduksi Hukum Jaminan Kebendaan,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt531eb1cff17ac/hukum-kepailitan-dinilai-reduksi-hukum-jaminan-kebendaan/>.